

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**

Diajukan oleh :

Novayanti

4518013036



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Guna memperoleh gelar

Sarjana ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : Novayanti

Stambuk/Nim : 4518013036

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhlis Ruslan, SE., M. Si Rita Falsella L., SE., M. Si., AK, CPAFS

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Dr. HJ. Herminawati Abubakar, SE., M. Si., M. M.

Ketua Program Studi
Akuntansi

Tharwain, SE., M. Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Novayanti

Stambuk/NIM : 4518013036

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dari sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain., kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sebuah kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat tanpa pemaksaan sama sekali.

Makassar, 09 Mei 2022




Novayanti
4518013036

**THE EFFECT OF PARTICIPATION OF BUDGETING ON THE
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT APPARATUS IN GOWA
REGENCY**

By:

NOVAYANTI

Accounting Study Program, Faculty of Economics

University Bosowa

ABSTRACT

NOVAYANTI. 2022. Thesis The Effect of Participation Of Budgeting on the Performance of Local Government Aparatus in Gowa Regency. Supervised by Dr. Muhlis Ruslan, SED., MS.i and Ripa Fajarina L, SE., M.Sc., Ak.

The purpose of this study was to determine and provide empirical evidence related to the effect of budgetary participation on the performance of local government officials in Gowa Regency.

The object of research in this study is the Gowa Regency Regional Revenue Agency. The analytical tools used are Simple Linear Regression Analysis, Descriptive Analysis Test, and Partial Test (t test).

The results showed that the participants in the budget preparation had a significant positive effect on the performance of local government officials in Gowa Regency.

Keywords: Participation in Budgeting, Performance of Regional Government Officials

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**

Oleh:

Novayanti

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

NOVAYANTI.2022. Skripsi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dibimbing oleh Dr. Muhlis Ruslan, SED., MS.i dan Ripa Fajarina L, SE., M.Si., Ak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi bukti empiris terkait pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Alat analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Sederhana, Uji Analisis Deskriptif, dan Uji Parsial (uji t)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan penyusun anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Aparat Pemerinta Daerah

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.
2. Bapak Dr. Hj Herminawati Abubakar SE.,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur SE.,MSi Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada bapak Dr. Muhlis Ruslan, SED., MS.i dan Ibu Ripa Fajarina L, SE., M.Si., Ak. Sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak DRS. H. Ismail Majid sebagai Kepala Bidang Kntor Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.
8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa sampai pada tahap akhir, terima kasih atas doa dan usaha yang tiada hentinya kepada peneliti.
9. Kepada Keluarga Jati sahabat saya, JND, dea, nanas dan perawati, terima kasih atas doa, dukungan dan juga semangatnya sehingga saya bisa ditahap ini.
10. Seluruh teman-teman Angkatan, terutama untuk kelas Akuntansi B Angkatan 2018 atas kekompakan, pelajaran hidup, dan senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang.
11. Dan yang terakhir terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya. Kebaikan dan ketulusan yang diberikan oleh penulis tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai ini mendapat imbalan dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi oini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan

bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang ,membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini,. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Ammin ya rabbal alamin.

Makassar, 05 Agustus 2022

Novayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori.....	8
2.1.1 Definisi Partisipasi Penyusunan Anggaran	8
2.1.2 Definisi Anggaran	14
2.1.3 Karakteristik Anggaran.	16
2.1.4 Manfaat Anggaran.....	17

2.1.5 Fungsi Anggaran.	17
2.1.6 Prinsip Anggaran.	20
2.1.7 Definisi Partisipan Penyusunan Anggaran	21
2.1.8 Kinerja	21
2.1.9 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja.	28
2.1.10 Perencanaan Kinerja.	29
2.1.11 Proses Penyusunan Anggaran.	29
2.2 Kerangka Pikir	32
2.3 Hipotesis.	32
III. METODE PENELITIAN	33
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.2.1 Jenis Data	33
3.2.2 Sumber Data	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Metode Analisis	35
3.5 Definisi Operasional.....	35
IV. METODE PENELITIAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	37
4.1.2 Job Description	39
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Karakteristik Responden	41

4.3 Analisis Data	43
V. KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	38
Gambar 2.3 Histogram	46
Gambar 2.4 Scatterplot.....	47
Gambar 2.5 Normal P-P Of Regression Standardized Residual	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	43
Tabel 4.4 Coefficients	44
Tabel 4.5 Descriptive Statistic	45
Tabel 4.6 One Sample Kolmogrov-Smirnov Test.....	46
Tabel 4.7 Correlations.....	48
Tabel 4.8 Reliability Statistics	48
Tabel 4.9 Coefficients	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan di berbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintah dan berbagai perguruan tinggi ataupun institusi lainnya. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan melanjutkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu perencanaan organisasi. Dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh aparat pemerintah didalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Meningkatnya kinerja organisasi yang tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang telah dibuktikan secara empiris oleh peneliti terdahulu, maupun faktor yang belum dimasukkan dalam penelitian. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sektor pemerintahan dalam melaksanakan tugas yang di emban mutlak memiliki rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas demi mencapai tujuan dari organisasi, terutama anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran ini dimaksudkan agar pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan anggaran dalam pemerintahan harus benar-benar memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Untuk itulah diperlukan informasi yang benar-benar akurat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, sebab jangan sampai usulan-usulan yang telah di sampaikan oleh masyarakat tidak terakomodasi dalam anggaran.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran bagi staff pegawai pemerintahan kabupaten gowa yaitu melakukan negosiasi target anggaran yang menurut mereka (pegawai pemerintahan) dapat dicapai pada kantor tersebut. Anggaran yang berhasil dicapai mencerminkan keberhasilan individu. Semakin tinggi partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin tinggi kinerja manajerial yang dapat dicapai.

Salah satu fungsi anggaran yaitu untuk mengendalikan biaya dan menentukan/memetakan bidang-bidang masalah dalam organisasi, perusahaan, pemerintahan, atau instansi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh elemen organisasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, tuntutan untuk penilaian kinerja menjadi sorotan oleh banyak pihak dikarenakan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengukur kinerja semakin besar sejak dikeluarkannya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Pendekatan penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan penyusunan anggaran tradisional, sebab tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah setempat berhasil mencapai tujuan kerja bersama dengan alokasi anggaran yang tersedia.

kualitas kinerja diukur salah satunya melalui partisipasi penyusunan anggaran yaitu partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses evaluasi kualitas kerja suatu pemerintahan dimana di dalamnya para pegawai dapat dinilai baik kualitas kerjanya dalam penyerapan anggaran sesuai dengan ketercapaiannya. Pengungkapan kinerja pemerintah daerah secara tepat dan objektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi semacam ini pada tahap selanjutnya menimbulkan

perbaikan atau peningkatan kinerja akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntut perbaikan dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Kabupaten Gowa, bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebanyak Rp. 92 miliar. Sejak 31 Desember 2019, dana SILPA sebanyak Rp. 92 miliar belum digunakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa mengatakan bahwa seluruh pelaporan dana SILPA sudah dihitung oleh BPK. Sehingga menurutnya, dana SILPA yang ada akan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) jika sudah mendapat persetujuan. Namun, hal itu tidak sesuai dengan pelaporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dimana beberapa kepala dinas yang dihadirkan untuk melaporkan sisa anggaran berbeda. Masalah penganggaran di daerah terjadi karena adanya tidak konsistenan dengan berbagai produk perencanaan yang telah disiapkan. Tidak jarang penganggaran berbenturan dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah di kabupaten gowa masih harus diperbaiki atau belum optimal.

Permasalahan tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membuat suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran

tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu, pengukuran kerja sangat kuat korelasinya dengan penyusunan anggaran. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam gambaran kenyataan yang terjadi di Kabupaten Gowa, penulis dalam hal ini memandang bahwa partisipasi penyusunan anggaran menjadi dua hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hubungannya terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Gowa dengan adanya partisipasi anggaran. Fenomena yang terjadi akibat penyusunan anggaran yang masih belum mematuhi kaidah-kaidah yang telah diterapkan. Pada beberapa sisi, khususnya program dan kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD, masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Gowa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memberi bukti empiris terkait pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terkhusus Kabupaten Gowa. Serta keikutsertaan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran.
- b. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya khasana keilmuan dalam bidang disiplin ilmu pada fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan Akuntansi Universitas Bosowa, dan juga sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberi kontribusi sekaligus memperkaya hasil penelitian dalam perkembangan wacana dan referensi atau penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah dan juga bagi mereka yang berminat

terhadap penelitian yang terkait.

b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipan penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Gowa. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi pejabat pemerintah daerah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh dalam partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja terhadap aparat pemerintahan di daerah Kabupaten Gowa.

d. Bagi Sektor lain

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus sehingga hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yang selanjutnya akan digunakan atau diimplementasikan pada sektor lain, sepanjang memiliki kasus yang sama.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan memberi informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah di daerah Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Definisi Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggungjawab bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga sisi psikologis yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap memiliki seseorang dalam pengambilan keputusan (Anthony dan Gobindrajan, 2018:36). Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, yang mana anggota organisasi ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam sesuatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Kusuma (2018), menyatakan bahwa tingkat keikutsertaan dan pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipasif dengan anggaran non partisipasif. Dengan penyusunan anggaran partisipasif diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Menurut Golson (2019) bahwa partisipasi anggaran ialah proses penyusunan anggaran secara bersama-sama oleh para manajer di semua level jabatan. Sementara Lubis (2019) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Menurut Lubis (2019), ada tiga tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran yaitu:

1) Penetapan Tujuan

Aktifitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas kedalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Pengontrol dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses penyusunan anggaran ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi, maupun gaya kepemimpinannya. Manajer tingkat bawah dan para karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan, karena mereka merupakan bagian dari organisasi tersebut, dengan demikian proses penyusunan anggaran akan terlaksana lebih efektif. Konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahap penetapan tujuan adalah proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, /dan komitmen.

2) Tahap Penerapan

Pada tahap penerapan rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Agar rencana tersebut berhasil, rencana harus dikomunikasikan secara efektif. Setelah itu, rencana formal mungkin akan menerima kerja sama penuh dari berbagai kelompok yang ingin dimotivasi olehnya. Konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi.

3) Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian pengikutsertaan atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama.

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi menurut Soetrisno (2018:221), yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu. Antoft dan Novack (2018) mengartikan partisipasi masyarakat (sipil) sebagai keterlibatan secara terus-menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhinya. Pentingnya partisipasi proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah merupakan pancaran kedaulatan rakyat. Otonomi diberikan oleh pemerintahan kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintahan daerah. Dengan demikian, pernyataan bahwa otonomi merupakan milik masyarakat tersebut sebagai subjek dan bukannya objek. Dengan adanya partisipasi proaktif masyarakat, baik kepada pemerintah maupun DPRD, maka banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh rakyatnya. Disinilah pentingnya bila masyarakat selalu berpartisipasi, terlebih dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Karena sesungguhnya masyarakat itu sendiri yang lebih tahu akan kebutuhan dan permasalahannya. Ada beberapa faktor yang sangat diperlukan pada partisipasi masyarakat sangat diperlukan antara lain :

- 1) Kebijakan publik di daerah selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
- 2) Kebijakan publik di daerah sesuai dengan harapan rakyat.

- 3) Kebijakan publik di daerah dapat menumbuhkan semangat persatuan.
- 4) Kebijakan publik di daerah dapat menimbulkan semangat bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu daerah, tentu kita mempunyai hak dan kewajiban upaya mendukung suksesnya pembangunan di daerah. Disamping itu, warga negara harus tanggap terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Hal itu dimaksudkan:

- 1) Agar kebijakan pemerintahan di daerah tidak menyimpah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Agar pemerintahan di daerah sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Agar pemerintahan di daerah selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Dukungan warga negara terhadap pemerintahan di daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
2. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Merawat keindahan lingkungan.
4. Membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Membayar pajak kendaraan bermotor.

Ada 2 faktor pendukung agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, yaitu:

1. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam DPRD itu sendiri,

dalam

arti bahwa anggota DPRD sebagai wakil rakyat, harus terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Adanya peningkatan kualitas kinerja ini merupakan syarat agar kepentingan rakyat terpenuhi.

2. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar DPRD, yang berupa partisipasi masyarakat. Sebagai warga negara, hendaknya kita selalu memberikan masukan kepada DPRD dalam berbagai bidang kehidupan antara lain sebagai berikut :
 - a) Menyampaikan masukan tentang permasalahan irigasi yang sangat dibutuhkan masyarakat petani di desa.
 - b) Menyampaikan masukan tentang permasalahan politik uang ketika terjadi pemilihan calon kepala daerah dan wakilnya.
 - c) Menyampaikan masukan tentang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, menurut Siegel dan Marconi (2019), partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran, akan menimbulkan inisiatif pada mereka untuk menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan, dan merasa memiliki, sehingga kerjasama diantara anggota dalam mencapai tujuan juga ikut meningkat. Keikutsertaan dalam menyusun anggaran merupakan suatu cara efektif untuk menciptakan keselarasan tujuan setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Jadi penting bagi suatu organisasi untuk turut mengikutsertakan anggota dalam menyusun anggaran demi terciptanya keefektifan.

2.1.2. Definisi Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018). Lebih rinci lagi, Halim (2019: 22) mengartikan anggaran yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki posisi yang penting. Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut dengan penganggaran. Dalam sektor publik, penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka. Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi

informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2018). Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Setelah anggaran disusun oleh setiap manajer pusat pertanggungjawaban, kemudian para lini manajemen pusat pertanggungjawaban tersebut akan melaporkan hasil pertanggungjawaban tersebut yang selanjutnya akan menjadi *feedback* bagi manajemen puncak sebagai pengukuran prestasi. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan terbangun suatu interaksi yang lebih baik antara manajemen puncak dan para lini manajer. Partisipasi akan memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi yang semakin baik antara satu dengan yang lainnya serta kerjasama dalam tim yang semakin baik solid untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian akan terciptalah komitmen untuk merealisasikannya ke arah yang lebih baik (Ngatemin,2018).

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan

dan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran (Indra Bastian, 2019: 163-164).

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (*output*), anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara itu, penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja (Arfan Ikhsan Lubis, 2018:226).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai perkiraan rencana kerja yang berisi penerimaan dan pengeluaran yang disusun secara sistematis untuk periode yang akan datang.

2.1.3. Karakteristik Anggaran

Anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(Indra

Bastian, 2018:81) :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.4. Manfaat Anggaran

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting (Mardiasmo,2018), yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang. Sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

2.1.5. Fungsi Anggaran

Mardiasmo dalam Abdul Halim (2018: 50-52) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Alat perencanaan;

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya;
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan;
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Alat pengendalian;

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;

- b) Menghitung selisih anggaran;
 - c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians;
 - d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
- 3) Alat kebijakan fiskal;

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

- 4) Alat politik;

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.

- 5) Alat koordinasi dan komunikasi;

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa

yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

2.1.6. Prinsip Anggaran

Ada tiga prinsip anggaran menurut Arsyad (1992) yaitu:

- a. Anggaran Berimbang dan Dinamis, Berimbang maksudnya jumlah keseluruhan pengeluaran (rutin dan pembangunan), selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaannya. Dinamis berarti dalam hal ini penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan. Demikian juga dengan penerimaan, apabila melampaui rencana semula, untuk menjaga keseimbangan pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya. Penerapan prinsip ini pada perekonomian berpengaruh terhadap stabilitas (menghindari inflasi), yang diasumsikan banyak tergantung dari tingkat ekspansi dari pengeluaran maupun tingkat kontraksi dari penerimaan.
- b. Anggaran Defisit, yaitu apabila pengeluaran pemerintah melampaui pendapatannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian bersifat ekspansif.
- c. Anggaran surplus, yaitu apabila penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif terhadap tenaga kerja produksi daerah dan output.

2.1.7. Definisi Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dianggap sebagian orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi dari para anggota organisasi. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, di mana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut (Supomo dan Indriantoro, 1998). Partisipasi menurut Arfan dan Muhammad (2019:173-175) adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.

Menurut Brownell (1982) dalam partisipasi merupakan proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. Jadi, partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak secara langsung dalam proses pengambilakan kebijakan penyusunan anggaran.

2.1.8. Kinerja

Kinerja dalam bahasa sehari-hari adalah aktivitas dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan karyawan adalah orang yang telah diterima sebagai karyawan yang telah bekerja pada perusahaan. Menurut J Rabianto (2018:19), menyatakan bahwa:

- a. Kinerja karyawan adalah keluaran fisik per unit dari usaha yang secara produktif.
- b. Kinerja adalah tingkat keefektifan dan manajemen pemasaran di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk pendapatan.
- c. Kinerja karyawan adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja.
- d. Kinerja karyawan adalah pengukuran seberapa baik sumber daya digunakan bersama di dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan-kumpulan hasil-hasil.
- e. Kinerja karyawan adalah usaha untuk mencapai tingkat (*level*) tertinggi dari unjuk laku (*performance*) dengan pemakaian dari sumber daya yang minim.

Melayu Hasibuan (2018: 25), menyatakan beberapa pengertian kinerja sebagai berikut:

- a) Kinerja karyawan adalah pada dasarnya suatu sikap yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu esik lebih baik dari hari ini.
- b) Secara umum kinerja karyawan mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan.
- c) Kinerja karyawan merupakan dua pengertian yang berbeda, adalah peningkatan pendapatan / penjualan menunjukkan pertambahan suatu hasil yang telah dicapai, sedangkan peningkatan kinerja karyawan mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara pencapaian pendapatan yang diinginkan.
- d) Peningkatan kinerja dapat dilihat dalam 3 (tiga) faktor:

- 1) Jumlah pendapatan/penjualan meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama.
 - 2) Jumlah penjualan yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang.
 - 3) Jumlah penjualan yang jauh lebih besar diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif lebih kecil.
 - 4) Oleh karena pendapatan/penjualan dan teknologi penambahan sumber daya yang relatif lebih kecil.
- e) Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam proses peningkatan pertumbuhan kinerja karyawan pada hakekatnya merupakan hasil karya manusia. J.Ravianto menyatakan (2018:18) bahwa kinerja karyawan adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta kerja karyawan persatuan waktu. Edwin B Flippo, (2018: 112) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah sebagai suatu perbandingan antara *output* (hasil yang dicapai) dan *input* (tenaga kerja), di mana kinerja karyawan yang digunakan selama proses pendapatan dikategorikan ke dalam *input* pendapatan.

Simanjuntak, (2018:15) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah mengefektifkan faktor kinerja karyawan yang secara langsung digunakan dalam proses pendapatan. Dengan memandang kinerja karyawan sebagai faktor masukan (*input*) yang paling utama guna meningkatkan kinerja karyawan pada suatu instansi, maka upaya ke arah penggunaan kinerja karyawan secara efektif semestinya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Upaya-upaya

penggunaan kinerja karyawan secara efektif ini dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Pelatihan karyawan pada suatu instansi, maka upaya ke arah penggunaan kinerja karyawan secara efektif semestinya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Upaya-upaya penggunaan kinerja karyawan secara efektif ini dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan seperti pelaksanaan pendidikan, latihan dan berbagai upaya lainnya dilaksanakan dalam pembahasan ini.

Kinerja pegawai secara umum adalah sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan didalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi oleh karena itu, kinerja juga merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Rivai (2019:309) konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut pendapat Ilyas (2019:55) mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik sebuah

kesimpulan yakni arti kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau beban tanggung jawab menurut ukuran atau standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang maka diperlukan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja menurut Simamora (2018:50) adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Dharma (2018:355) pengukuran kinerja harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan harus dicapai.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat menyediakan suatu sarana untuk menilai kinerja karyawan dan hasil penilaian dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji/upah, penguasaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam promosi jabatan atau penentuan imbalan. Penilaian kinerja memacu pada suatu sistem

formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Mangkunegara (2018:10), Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut pendapat Rivai (2019:324) menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode penilaian berorientasi masa lalu.

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan mengevaluasi prestasi kerja masa lalu. Metode dengan pilihan terarah, metode peristiwa krisis serta catatan prestasi karyawan dapat mendapat umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi.

b. Metode penilaian berorientasi masa depan.

Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai obyek penilaian yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Berikut ini

adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai didalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara (2019:13-14) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari:

1. Kemampuan potensi (*IQ*).
2. Kemampuan *reality* (*knowledge + skill*).

Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki *IQ* di atas rata-rata (*IQ* 110-120) apalagi *IQ superior, very superior, gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal.

b. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (*pro*) situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya, jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja. Menurut Saparuddin (2019:12), Supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan berupa:

1. Pembinaan yang terus-menerus.
2. Pengembangan kemampuan profesional pegawai.
3. Perbaiki situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja

Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008 menyatakan : tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut.
4. Penghargaan dan sanksi yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

2.1.9. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*outpun dan outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Bambang Sancoko, dkk : 2018).

Abdul Halim (2018) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

2.1.10. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategis, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

2.1.11. Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran, dimana setiap manajer dalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Proses penyusunan anggaran itu sendiri melibatkan banyak pihak mulai dari manajer tingkat bawah sampai manajer tingkat atas (Siegel, 2018). Proses penyusunan

anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan top-down, pendekatan bottom-up, dan participative budget (Anthony dan Govindarajan, 2018).

1. *Top-down approach* (Pendekatan dari atas ke bawah)

Dalam pendekatan ini proses penyusunan anggaran dimulai dari manajer puncak. Anggaran disusun dan ditetapkan oleh pimpinan dan anggaran harus dilaksanakan bawahan. Anggaran top-down mempunyai kelemahan, seperti kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, dan sulit berhasil mencapai tujuan.

2. *Bottom-Up approach* (Pendekatan dari bawah ke atas)

Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa mendatang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Meskipun dapat menciptakan komitmen manajemen bawah, namun anggaran bottom-up mempunyai kelemahan sebagai berikut : seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin tercapai terlalu mudah.

3. *Participative approach* (Anggaran Partisipasi)

Pendekatan penganggaran yang melibatkan manajer level menengah dalam pembuatan estimasi anggaran disebut *Participative Budget*. Anggaran partisipasi adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer

pada semua tingkatan. Keberhasilan program anggaran terutama akan ditentukan oleh cara pembuatan anggaran itu sendiri. Proses penyusunan anggaran bias dari atas ke bawah, bias juga sebaliknya, dan ada juga yang menggunakan gabungan dari keduanya.

Keberhasilan anggaran dapat ditentukan dengan mengukur kinerjanya. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja manajerial para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, meliputi perencanaan, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi dan representatif.

Anggaran yang disusun secara *participative* merupakan cara efektif untuk memotivasi kinerja bawahan (Hofstede,2018, dalam Sumarno, 2018). *Participative Budget* melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetepkan dalam anggaran.

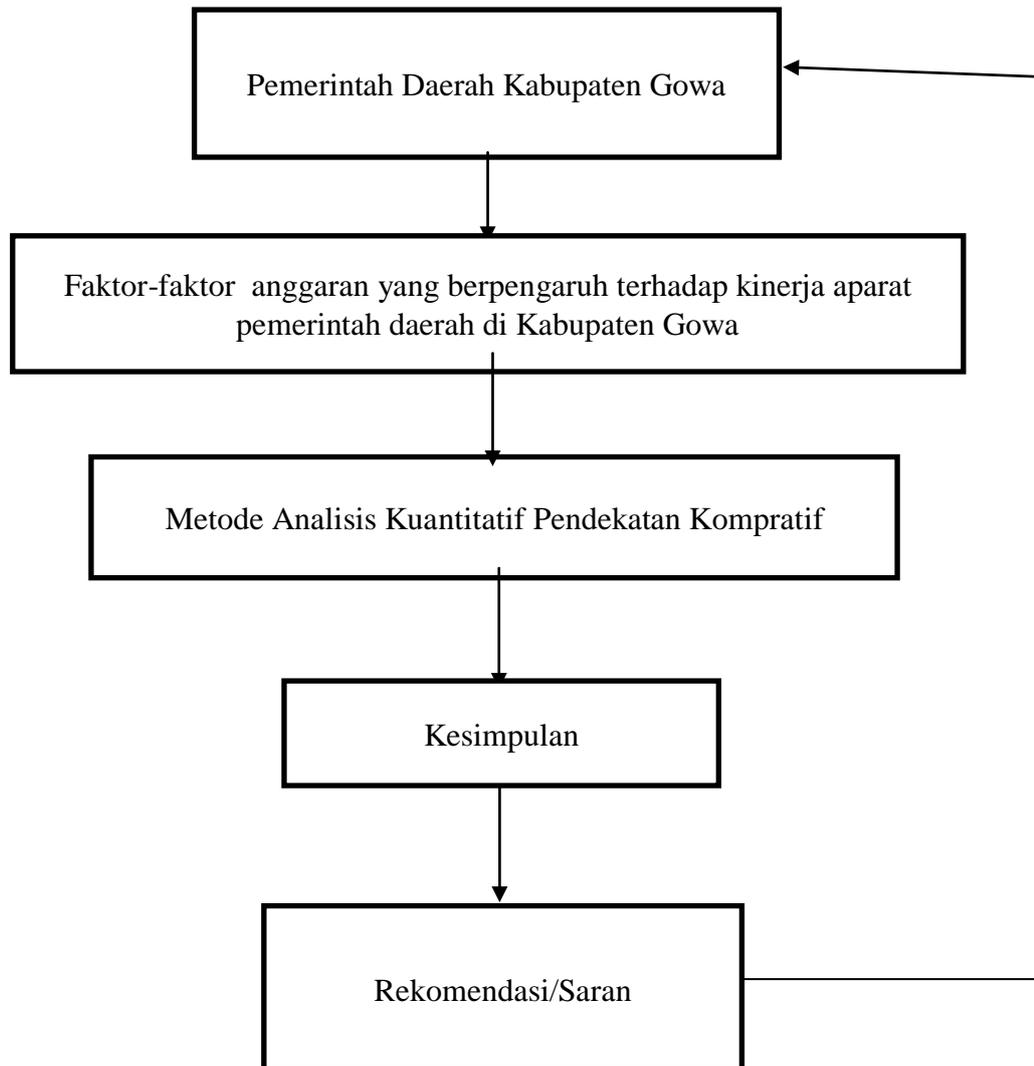
Menurut Bambang Hariadi (2018), ada tiga (3) persoalan yang dihadapi dalam penyusunan anggaran yang bersifat partisipatif, yaitu:

1. Menetapkan standar atau target terlalu tinggi atau terlalu rendah
2. Timbulnya anggaran *slack*.
3. Adanya partipasi semu.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih memungkinkan bagi para bawahan untuk melakukan negosiasi mengenai target anggaran yang menurut mereka bisa dicapai (Brownell dan Mcinnes 2019). Dengan demikian anggaran yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan bersama yang sesuai dengan kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu.

2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1.
Kerangka berfikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: “diduga bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data dan informasi sebagai penunjang utama dalam proposal ini, maka penulis memilih objek penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Tumanurung Raya No.2, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian diperkirakan mulai bulan maret 2022 sampai pada bulan April 2022.

3.2. Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab oleh peneliti oleh peneliti terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat) oleh pihak lain.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau data laporan sejarah yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan. Data yang dikumpulkan 26 melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan data yang telah diproses seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan dokumentasinya.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh informasi yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar landasan bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis memperoleh beberapa cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian. penelitian ini di lakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pimpinan dan staff atau pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang - bidang permasalahan yang akan di bahas oleh penulis untuk memperoleh informasi yang bermutu dan dapat di percaya. Adapun data di lakukan melalui:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

b. Survei

Metode pengumpulan data dengan survei kepada sampel yang berisikan item-item pertanyaan mengenai penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah kabupaten Gowa.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang berupa gambar maupun dokumen yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah kabupaten Gowa.

3.4 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Data Kuantitatif merupakan data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi. Metode Komparatif adalah metode analisis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari objek penelitian dengan data pembanding.

3.5. Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Perlakuan akuntansi aset tetap adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset tetap mulai dari perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap hingga pelepasan aset tetap. Perlakuan akuntansi aset tetap harus dilakukan dengan benar karena adanya keterkaitan perhitungan, melakukan perhitungan 27 pada penyusutan aset tetap. Sementara pelepasan aset tetap dihitung berdasarkan aset tetap setelah penyusutan.
3. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
4. Pengakuan dan pengukuran aset tetap adalah aset tetap dicatat (diakui) dalam laporan keuangan yang dilakukan pada awal perolehan aset tetap juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh.
5. Pelepasan aset tetap adalah kegiatan pengurangan jumlah aset yang dilakukan perusahaan karena berbagai alasan.
6. Penyajian aset tetap adalah penyajian dalam neraca yang harus dilaporkan sebesar harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan pendapatan daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui upaya-upaya penggalian potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dapat mewujudkan Kabupaten Gowa sejajar dengan Kabupaten termaju lainnya di Indonesia dan menjadi daerah andalan Sulawesi Selatan.

4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

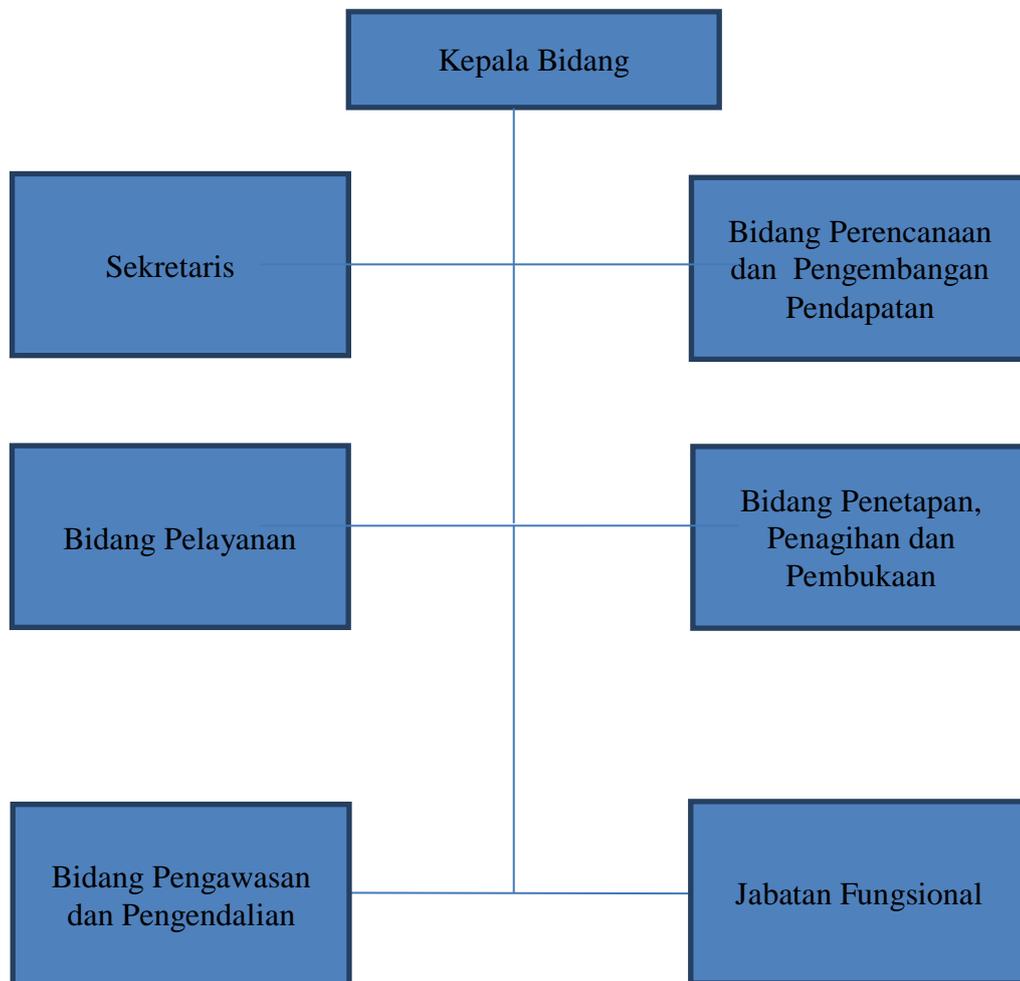
Terwujudnya badan pendapatan daerah yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah melalui tatakelola pemerintahan yang baik.

2. Misi

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan lainnya.
2. Mengkordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.

3. Meningkatkan upaya intensifikasi dan eksentifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
4. Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi



4.1.2 Job Description

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas kepala bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategi dalam penyelenggaraan kegiatan badan.
2. Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan.

2. Sekertaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, membrikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian.
2. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

3. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan

Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan dipimpin oleh kepala

bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengordinasikan perencanaan dan pengembangan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas, kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan mempunyai fungsi:

1. Menyatakan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
2. Pelaksanaan kewajiban teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan .
4. Bidang pelayanan dan pendapatan daerah.

Bidang pelayanan dan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengordinasikan pelayanan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, kepala bidang pelayanan dan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain bidang pelayanan pendapatan daerah.
5. Bidang penetapan, penagihan dan pembukuan

Bidang penetapan, penagihan dan pembukuan dipimpin oleh kepala dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas, kepala bidang penetapan, penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penetapan, penagihan dan pembukuan.
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan, penagihan dan pembukuan.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penetapan, penagihan dan pembukuan.
6. Bidang pengawasan dan pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pengendalian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	18	38%
Perempuan	29	62%
Total	47	100%

Sumber: Data Periode 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh data dari 47 orang, bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang atau sebanyak 38% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang atau sebesar 62%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase %
21 - 25 Tahun	15	32%
26 – 36 Tahun	21	45%
37 – 45 Tahun	11	23%
Total	47	100%

Sumber: Data Periode 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa komposisi tingkat usia terbanyak berada pada titik usia 26-36 tahun sebanyak 21 orang responden dengan persentase sebanyak 45%.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Deskripsi responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase %
2-8	10	21%
11-19	29	62%
20-28	4	8%
31-36	4	8%
Total	47	100%

Sumber: Data Periode 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tingkat lama menjadi pegawai yang terbanyak adalah tingkat 11-19 tahun sebanyak 29 Orang dengan persentase 62%.

4.2 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis uji regresi linear sederhana, uji analisis deskriptif, uji normalitas, uji validitas dan uji reliabilitas, uji parsial (uji t) sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2017), analisis regresi linear sederhana merupakan pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan dependen, di mana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.136	.490		6.405	.000		
	Partisipan Penyusun Anggaran	.249	.119	.298	2.096	.042	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan uji regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa

$$Y = 3,136 + 0,249$$

Persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a = 3,136 merupakan nilai konstanta

b = 0,249 artinya variabel partisipan penyusun anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan apabila variabel kinerja aparat pemerintah daerah meningkat satu satuan, maka partisipan penyusun anggaran akan meningkat sebesar 0,249.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai fakta yang ada secara faktual dan sistematis. Metode analisis deskriptif yang digunakan adalah hasil pengoperasian variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan (kuesioner), dimana setiap item dari kuesioner memiliki lima jawaban dengan bobot nilai yang berbeda.

Tabel 4.5
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipan Penyusun Anggaran	47	3.67	4.67	4.1135	.23340
Kinerja Aparat Pemerintah	47	3.78	4.67	4.1608	.19496
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan uji analisis deskriptif pada tabel di atas diketahui bahwa Partisipan penyusun anggaran (X) memiliki jumlah sampel 47. Rata-rata sebesar 4.1135 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.23340 dan nilai minimum sebesar 3.67 serta nilai maximum sebesar 4.67. Sedangkan

Hasil analisis deskriptif untuk variabel Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) memiliki jumlah sampel 47. Rata-rata sebesar 4.1608 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.19496 dan nilai minimum sebesar 3.78 dan nilai maximum sebesar 4.67.

c. Uji Normalitas

Uji statistik ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik yang dimiliki oleh sekelompok data tanpa melakukan generalisasi yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang dikenal pada populasi induknya.

Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Unstandardized Residual

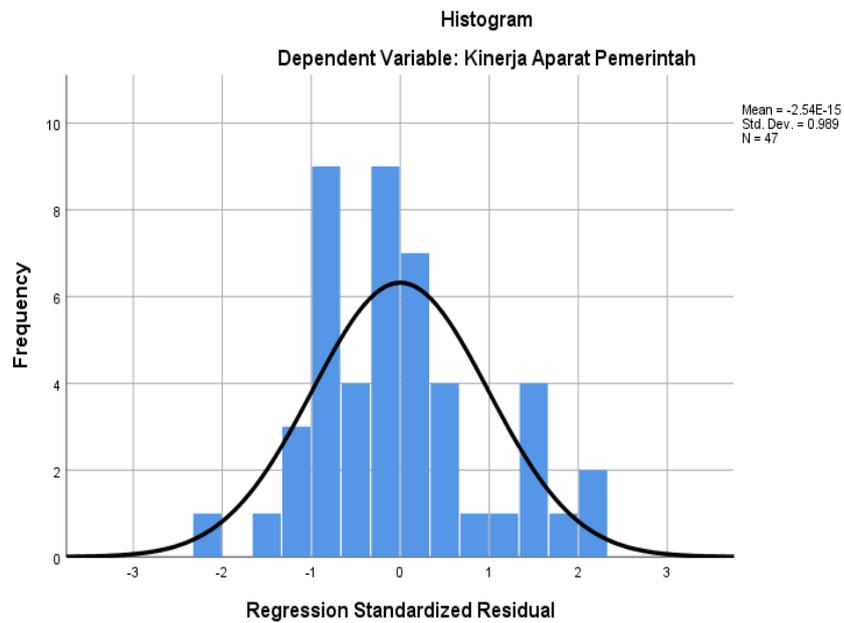
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18608780
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.076
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c

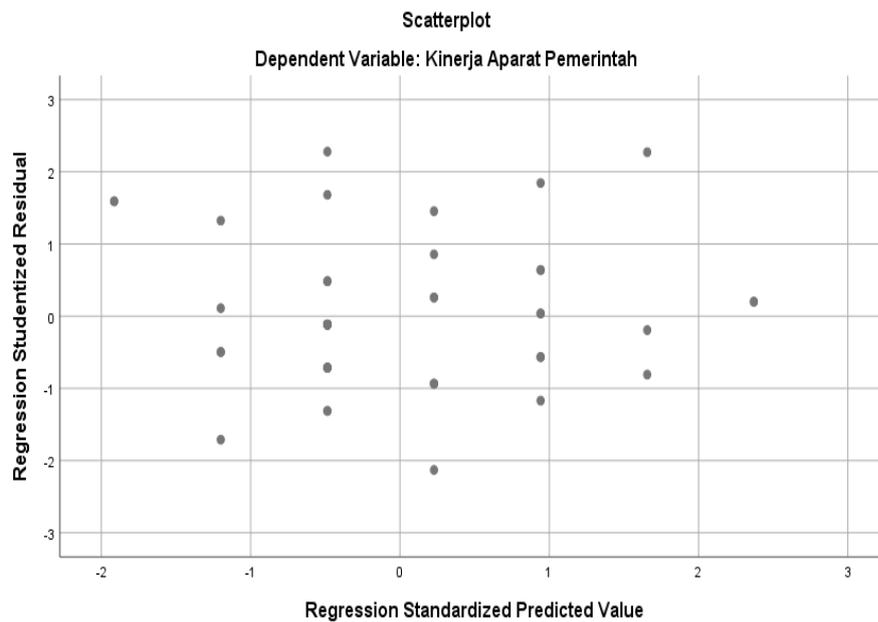
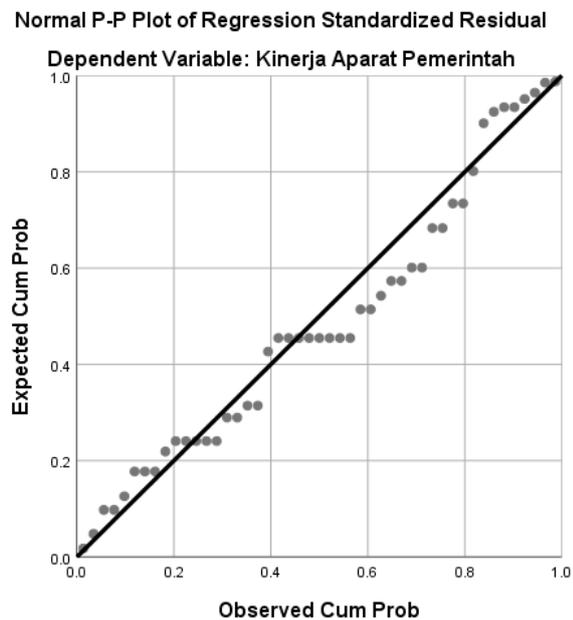
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 2.3



Gambar 2.4**Gambar 2.5**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

d. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas adalah uji yang menunjukkan derajat ketepatan antara

data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dikatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali 2016). Suatu variabel dikatakan jika cronbach alfa lebih $> 0,60$.

a. Uji Validitas

Tabel 4.7

Correlations

		Pertisipan Penyusun Anggaran	Kinerja Aparat Pemerintah
Pertisipan Penyusun Anggaran	Pearson Correlation	1	.298*
	Sig. (2-tailed)		.042
	N	47	47
Kinerja Aparat Pemerintah	Pearson Correlation	.298*	1
	Sig. (2-tailed)	.042	
	N	47	47

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

b. Uji Reabilitas

Tabel 4.8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.454	2

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

e. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016), uji parsial menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hit} < t_{tab}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Tabel 4.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.136	.490		6.405	.000
Partisipan Penyusun Anggaran	.249	.119	.298	2.096	.042

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

Berdasarkan uji parsial pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,096 lebih besar dari nilai t tabel 2,014 dengan nilai signifikan sebesar $0,042 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan penyusun anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

4.2.3 Partisipan Penyusun Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Daerah

Partisipan penyusun anggaran memiliki peran yang cukup besar dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan salah satu bentuk keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam suatu organisasi, untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran organisasinya.

Dengan keikutsertaan aparat pemerintah daerah akan mendorong aparat tersebut untuk bisa bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang telah diamanatkan, sehingga hal ini akan meningkatkan kinerjanya.

Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah proses di mana individu yang terlibat dalam penyusunan target anggaran yang kemudian individu tersebut akan dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan dapat membangun sebuah interaksi yang lebih baik antara pemimpin dengan bawahan dengan demikian, akan terciptanya kinerja aparat pemerintah yang kuat untuk ke arah yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusun anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai alfa yaitu sebesar $0,042 < 0,05$. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji parsial di mana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu sebesar $2,096 > 2,014$. Ini berarti semakin baik partisipasi penyusun anggaran maka semakin baik pula kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi penyusun anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, artinya semakin baik partisipasi penyusun anggaran maka semakin baik pula kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari uji parsial (t) di mana nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa yaitu $0,042 < 0,05$ dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu $2,096 > 2,014$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa di atas maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Kepada pihak kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa diharapkan bisa meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menguji kembali variabel-variabel penelitian sebelumnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih konstan dari peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. E., Sembiring, L. D., SE, M. A., Supitriyani, S. E., Khairul Azwar, S. E., Ak, M., ... & Kom, S. 2021. *Analisis Laporan Keuangan*. Media Sains Indonesia.
- Bastian, I. 2019. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Fitriani, B. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Sitti Khadijah III Di Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Firman, M. 2021. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa*.
- Ghozali, I 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayadi, Rizon 2015. *Pengaruh Desentralisasi, Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, vol.2, no.2
- Indarto, Stefani Lily; Ayu, Stephana Dyah. *Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perusahaan melalui kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, dan Job Relevant Information (JRI)*. *Seri Kajian Ilmiah, 2011, 14.1: 1-22*.
- Ismid, F 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil*. Universitas Medan Area.
- I Gusti Putu Darya, M. M. 2019. *Akuntansi Manajemen*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kartini, Rita 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala)*. Master thesis, STIE Indonesia Banjarmasin.
- Karianga, Dr. Hendra; SH, M. H. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana, 2018.

- Mohamad, Sitti Maryam; Tinangon, Jantje J.; Elim, Inggriani. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2014, 2.3.
- Mardiasmo, M. B. A., et al. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Ningrum, E. P. 2022. *Nilai Perusahaan: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Adab
- Pratiwi, Wiwik; Kartika, Andari Asri. *Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2019, 22.1: 50-60.
- Prihandini, A. N. 2018. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*.
- Rozarie, C. R. D., & Indonesia, J. T. N. K. R. 2017. *Manajemen sumber daya manusia. Indonesia, Republik. "Standar Akuntansi Pemerintahan." Peraturan Pemerintah 71 (2010)*.
- Sarwono, Jonathan. 2000. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Zainal, V. R., Ramly, H. M., Mutis, T., & Arafah, W. 2019. *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik*.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfaBeta.
- Septiana, A 2018. *Analisis laporan keuangan (Pemahaman dasar dan analisis kritis laporan keuangan)*. Vol. 93. Duta Media Publishing.
- Tucunan, Roy Johan Agung; Supartha, Wayan Gede; Riana, I. Gede. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi dan kinerja Karyawan*. E-jurnal ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019, 3.09: 533-550.
- Yusnaldi, Y. 2021. *Pengaruh Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Penerimaan Kas, Dan Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal*. Journal of Industrial Engineering & Management Research